

BAB V

KESIMPULAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta) terbukti sukses dibawakan dan diaplikasikan oleh kesultanan Turki Ustmani. Pluralisme agama yang menjadi permasalahan sensitif bagi masyarakat dan pemimpin non muslim pada abad pertengahan, tidak pernah menjadi masalah yang terlalu dipersoalkan oleh pemimpin-pemimpin muslim, terlebih pada masa kesultanan Turki Ustmani. *Khilafah Islamiyah*, merupakan suatu sistem yang diterapkan di Kesultanan Turki Ustmani dimana hukum dan *syari'at* Islam menjadi landasan untuk berdirinya negara dengan sistem pemerintahan Islam. Seperti yang telah dicontohkan dan diterapkan oleh kesultanan Turki Ustmani, masyarakat serta agama yang heterogen tidak menjadikan sebagai permasalahan, bahkan dapat menunjukkan kemegahan dan kejayaannya tanpa adanya diskriminasi bagi kalangan non muslim.

Persatuan dan kesatuan yang tangguh ditunjukkan oleh masyarakat heterogen Turki Ustmani kala terbagung dalam pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan konstantinopel, bahkan pasukan perang khusus Sultan dengan nama Jenissari tidak hanya beranggotakan orang-orang muslim saja, tetapi juga orang-orang non muslim yang direkrut dan bersedia patuh terhadap Sultan. Pasukan Jenissari inilah yang kemudian menentukan keberhasilan penaklukan Konstantinopel. Selain itu, Turki Ustmani dikenal sebagai kesultanan yang sangat perkasa pada jaman kejayaannya tatkala kesultanan Turki Ustmani berhasil menaklukkan sepertiga wilayah bagian dunia dan menancapkan bendera kesultananya pada masing-masing wilayah kekuasaan Turki Ustmani. Hal ini tercipta karena adanya integrasi antara masyarakat muslim dan non muslim yang saling percaya dan patuh kepada satu kepemimpinan Sultan.

Enam abad lamanya Turki Ustmani menjalankan roda pemerintahan dengan sistem tersebut, munculnya delegitimasi dari masyarakat sebagai akibat khalifah yang tidak cakap dalam memimpin kesultanan dan cenderung melakukan penyimpangan menjadi justifikasi bagi para Ulama bahkan pasukan Jenisarri untuk melakukan pemberontakan sehingga tidak jarang Sultan yang berkuasa harus mengakhiri kepemimpinannya lebih awal. Revolusi Industri di Prancis yang menjadi tonggak awal berkembang pesatnya pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dikawasan Eropa tidak kunjung juga membuat Turki beranjak dari stagnanisasi berijtihad dalam bidang apapun. Mayoritas masyarakat pada umumnya dan para pemikir di Turki Ustmani lebih memilih untuk mengikuti berbagai hal yang telah ada sebelumnya, menutup diri pada perkembangan dan merasa puas atas capaian yang telah diperoleh pada masa lalu.

Dengan kondisi masyarakat dan negara yang semakin terpuruk membuat sebagian masyarakat yang lain menjadi risau. Beberapa orang berkumpul dan membentuk suatu pergerakan dengan visi dan misi menyelamatkan Turki Ustmani dari ambang kehancuran. Hal tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya kelompok reformis nasionalis memberikan alternatif untuk menyelamatkan Turki Ustmani dari krisis yang tengah melanda negeri itu restrukturisasi politik. Restrukturisasi tersebut memungkinkan untuk melakukan perubahan pada hal-hal yang paling fundamental termasuk sistem *khilafah Islamiyah*.

Gagasan Pan Islamisme yang dikampanyekan oleh Sultan sebagai bentuk perlawanan atas gerakan nasionalis dan menghedaki agar umat muslim tetap berada dalam satu tubuh dan satu garis dibawah komando khalifah, tidak mampu membendung gerak kaum reformis yang semakin berkembang pesat.

Gerak perjuangan kaum reformis semakin banyak mendapat dukungan dikala kekalahan perang dunia satu menyebabkan Turki Ustmani harus rela dijadikan tempat bernaung oleh

Inggris, duapuluh tujuh pasal ditandatangani antara Ustmani dan Inggris yang menjadai perwakilan pasukan entente memungkinkan pendudukan atas wilayah kekuasaan Turki Ustmani beserta Istanbul ibu kota pemerintahan. Perjuangan kemerdekaan yang dicetuskan oleh kelompok reformis nasionalis dipimpin langsung oleh Mustafa Kemal At-Taturk sukses mengusir dominasi Inggris dari Turki Ustmani menyebabkan Turki Ustmani mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berada diatas angin karena momentum besar tersebut dimanfaatkan oleh Mustafa Kemal untuk melakukan revolusi Sistem Pemerintahan Turki Ustmani. Paham dan ideologi Mustafa Kemal mengenai konsep negara yang sekuler dituangkan dalam penghapusan Khilafah Turki Ustmani kemudian diganti dengan Republik Turki yang memicu kontroversi seantero dunia, khususnya dunia Islam. Beberapa pihak mengomentari apa yang dilakukan Mustafa Kemal merupakan suatu perbuatan yang terlaknat, menyebabkan perpecahan pada umat Islam dan mengancam pada melemahnya eksistensi umat Islam karena kehilangan imam atau khalifah sebagai simbol pemersatu umat muslim seluruh dunia.

Tetapi fakta berbicara lain, apa yang dikemukakan oleh Ali Abd al-Raziq barang kali menjadi salah satu fakta yang bisa digunakan untuk menjawab keruntuhan khilafah Turki Ustmani. Melalui pendekatan sekuler, beliau berpendapat bahwa jatuhnya kekhilafahan Turki Ustmani lebih disebabkan oleh hancurnya moral para khalifah yang memimpinnya. Sistem Khilafah yang seharusnya dapat memajukan dan membawa umat keluar dari keterbelakangan nyatanya lebih mengarahkan terjadinya penentang-penentang oleh kaum separatis, Khilafah ditegakkan dengan tekanan dan paksaan serta para khalifah selalu berlaku sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip keislaman. Menurut Ali Abd al-Raziq tidak adanya batasan kekuasaan yang jelas pada sistem khilafah, memungkinkan khalifah cenderung melakukan penyimpangan-peynimpangan yang lebih banyak mengorbankan rakyat demi kepentingan pribadinya. Beliau mencoba mengutip sejarah Islam dan hadist nabi dimana sistem khilafah

tidak pernah di syaratkan oleh nabi Muhammad dan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa ‘sesungguhnya kamu lebih paham mengenai urusan dunia mu’, membuat Ali Abd al-Raziq menjustifikasikan bahwa revolusi system pemerintahan Turki Ustmani tidak bertentangan dengan agama Islam.

Penyimpangan yang terjadi di kerajaan Turki Ustmani tidak semata-mata dilakukan oleh para khalifah saja, tetapi juga para elite politik dibawahnya. Terdapat kesenjangan sosial yang cukup jauh antara para elite politik dengan masyarakat Turki. Selain itu, tidak adanya kesamaan hak dan kewajiban antara kaum elite dengan masyarakat biasa semakin memperlebar jarak tersebut. Contohnya adalah tidak adanya kewajiban membayar pajak bagi elite politik, izin untuk menggunakan senjata, ketidakadilan dimata hukum, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu saja sudah bertentangan dengan konsep khilafah Islamiyah yang diterapkan pada awal berdirinya kerajaan Turki Ustmani sampai berhasil mempertahankan kejaannya selama lebih dari 600 tahun.

Penyimpangan yang secara terus-menerus terjadi dalam pemerintahan Turki, ditambah dengan permasalahan krisis ekonomi, lepasnya wilayah kekuasaan Turki satu per satu, bebarnya pasukan militer Turki, serta banyak pemicu lain membuat kondisi kerajaan tersebut carut marut. Masyarakat yang mengalami deligitimasi atau ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan membuat sebuah gerakan revolusi yang bersifat reformasi. Gerakan tersebut dipelopori oleh gerakan Turki Muda yang berisi prajurit-prajurit militer dan cendekiawan muda yang tidak puas dengan berjalannya sistem khilafah. Turki muda sempat mengalami pecah kongsi karena perbedaan ideologi anggotanya. Kerajaan Turki Ustmani sudah terpecah-belah dan sulit untuk dipersatukan kembali.

Berbagai upaya dilakukan para Sultan yang sedang berkuasa untuk mengembalikan kondisi kerajaan seperti semula. Misalnya di masa sultan Selim III mengadakan program *nizami cedit*

(orde baru), sultan Abdul Hamid II yang merombak lembaga-lembaga pemerintahan dan berupaya memperbaiki kondisi ekonomi, serta membuat Pan Islamisme yang dimotori oleh Jamaludin Al-Afghani sebagai tandingan Turki Muda. Namun upaya tersebut terkalahkan oleh ambisi revolusi Turki Muda yang termotivasi oleh konstelasi Internasional dengan memunculkan keberhasilan Eropa sebagai kawasan adidaya yang baru.

Revolusi sistem pemerintahan Turki tidak terelakkan. Turki Muda dibawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha berhasil memproklamirkan kemerdekaan Turki sebagai negara sekuler di tahun 1924. Hal tersebut dilakukan untuk memangkas akar permasalahan segala penyimpangan dan masalah yang terjadi di negara tersebut. Mustafa Kemal Pasha berpendapat bahwa Turki akan menjadi lebih baik apabila memiliki hukum yang terpisah dari hukum agama, serta tidak mencampurkan urusan agama dengan urusan negara. Selain itu, telah terbukti bangsa-bangsa yang menganut paham tersebut maju dan berkembang lebih baik daripada sistem kerajaan otoriter. Modernisasi dan sekularisasi menjadi sebuah *trend* di masa tersebut, tak terkecuali bagi Turki.

Sekularisasi yang menjadi fokus utama gerakan kemalisme mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan pemerintahan dengan mengarah gaya barat. Penghapusan khilafah Turki Ustmani, mengganti tulisan Arab ke dalam tulisan latin, mengharuskan masyarakat Turki untuk mengganti pakaian tradisional dengan pakaian modern ala barat yang berdampak pada pelarangan penggunaan jilbab, menutup madrasah dan digantikan dengan sekolah formal modern menggunakan kurikulum pendidikan Prancis, mengganti kalender hijriah dengan masehi yang berujung menetapkan hari minggu sebagai hari libur menggantikan hari Jum'at menjadi fokus utama dalam merubah wajah Turki ke bentuk negara Republik demokratik.

Dari uraian diatas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa adanya revolusi sistem pemerintahan Turki dari khilafah Islamiyah menuju negara sekuler disebabkan karena adanya

beberapa faktor, terutama ditinjau dari perspektif sekularisme yang dikemukakan oleh Ali Abd al-Raziq. Faktor-faktor tersebut yang kemudian menjawab pertanyaan mengapa Turki melakukan revolusi sistem pemerintahan dari khilafah Islamiyah menuju negara sekuler adalah :

1. Karena kegagalan khilafah dalam menjalankan pemerintahan pada tahun 1800-an sehingga memunculkan delegitimasi dari rakyat yang berakibat perubahan sistem pemerintahan menjadi Negara sekuler.
2. Konstelasi Internasional pada abad ke 18 – 19 M yang memunculkan Eropa sebagai kawasan adidaya.